

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Permasalahan

IIPAC atau Indonesia Israel Public Affairs Committe merupakan INGO yang diharap mampu menjembatani lidah para penganut bahkan yang pro terhadap Yahudi ini mungkin belum terlalu umum ditelinga masyarakat Indonesia. Ini disebabkan gerakan yang diketuai oleh Benjamin Ketang ini bisa dikatakan gerakan yang *underground*. IIPAC sendiri merupakan suatu wadah informal bagi para investor, maupun kalangan bisnis yang lain untuk bekerja sama.

Ini juga disebabkan pada zama kepemimpinan Abdurahman wahid, lewat Alwi shihab, Gus Dur ingin sekali Indonesia mampu membuka kran diplomatik dengan Israel. Bukan hanya bertujuan untuk kerjasama dalam bidang ekonomi tapi juga sebagai juru diplomasi dalam konflik berkepanjangan Israel-Palestina. Dengan itu di harap Indonesia mampu memiliki posisi tawar yang diperhatikan dunia sebagai mediasi perdamain negara yang sedang bertikai. Namun usaha ini gagal karena mendapat perlawanan dari umat islam dan tidak sesuai dengan UUD 45 yang menolak kolonialisme.

Jika di Amerika ada lembaga lobi Yahudi The American Israel Public Affair Comitte (AIPAC) yang sangat berperan penting dalam menyetir kebijakan politik dan menentukan kemana arah kebijakan Amerika mengenai Timur Tengah, maka di Indonesia pada Jumat, 29 Januari 2010, bertempat di sebuah tempat di Jakarta, sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Komite Urusan

Publik Indonesia-Israel (The Indonesia Israel Public Affair Comitte- IIPAC) dirilis ke publik. Sebelumnya, tepatnya 21 Januari 2002, IIPAC sudah resmi didirikan dan memiliki akta notaris yang dikeluarkan oleh kantor notaris Nirmawati Marcia, SH di Jakarta.¹

Komite ini memiliki tujuan yang sama yaitu berharap arah dan tujuan politik Indonesia mampu menguntungkan pihak mereka. Peran IIPAC sendiri belum terlalu terlihat atau mungkin sengaja ditutup-tutupi, namun pada dasarnya, apabila menurut pada protokol Indonesia-Israel pasal 4 yang disahkan bertepatan dengan tanggal berdirinya, IIPAC mempunyai peran yaitu menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga-lembaga Israel dan melindungi hak-hak warga negara Yahudi dan keturunan Yahudi di Indonesia. Serta memajukan kerjasama bisnis, Investasi, IT, dan pendidikan tinggi dengan universitas di seluruh dunia.²

Banyak kerjasama menguntungkan antara Indonesia-Israel yang kemungkinan juga melibatkan IIPAC sebagai perantara. Serta ada juga anggapan bahwa IIPAC juga telah menyiapkan kandidat untuk pemilu yang telah berlangsung kemarin, agar pro dan bersedia membuka kran diplomatik apabila terpilih. Maka dari itu mungkin ada peran yang di sisipkan dalam pemilu kemarin agar aspirasi mereka tercapai. Ini juga didukung dengan pernyataan Ketang, "Tahun 2014, kami akan mencari calon presiden atau partai mana yang bisa menjamin terciptanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Yang kita butuhkan adalah siapa yang mau bekerjasama mendirikan kedutaan besar Indonesia-Israel," kata direktur eksekutif IIPAC Benyamin Ketang.³

¹ <http://perang-ide.blogspot.com/2012/03/iipac-lembaga-lobi-zionis-di-indonesia.html>

² <http://iipac.wordpress.com/about/protokol-indonesia-israel>

³ <http://www.erasuslim.com/berita/nasional/protokol-of-zion-ala-indonesia-dicari-calon-presiden-pro-israel-di-2014>

Di sisi lain Indonesia merupakan negara penganut paham demokrasi, yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari, hingga memberikan suara dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena Indonesia percaya bahwa itu semua hak setiap warga negaranya. Disisi lain, para pemimpin bahkan masyarakat Indonesia percaya bahwa demokrasi merupakan suara rakyat, atau sering disebut dengan “*vox populi vox dei*” yang berarti “suara Rakyat, suara Tuhan”. Karena disisi lain, dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya dalam ungkapan “Pemerintah dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanya, diterjemahkan dalam Konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang dasar 1945 bagi Pemerintahan Republik Indonesia.⁴

Salah satu bentuk cerminan mengenai berdemokrasi ialah dengan berdirinya LSM atau Lembaga Masyarakat Swadaya dan komunitas yang berbasis *civil society* yang lepas dari intervensi pemerintah. Keberadaan LSM dan komunitas atau perkumpulan-perkumpulan di Indonesia kemudian juga mulai menjamur semenjak kebebasan dalam berkumpul mulai didapat seluruh warga Indonesia dengan ditandai runtuhnya rezim Orde Baru. Namun dewasa ini, organisasi atau LSM lah yang diharapkan mampu memainkan peranan mengisi ruang publik dalam *civil society* dengan porsi yang lebih banyak. Kehadiran NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat ini salah satu bentuk keterbatasan pemerintah.

⁴ Affan Gaffar, 1999, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Salah satu contoh lembaga yang muncul akibat dari keterbatasan pemerintah ini ialah kehadiran lembaga Internasional non pemerintah yaitu Indonesia-Israel Public Affairs Committee (IIPAC) di Indonesia.

Awal hubungan ‘mesra’ Indonesia-Israel dimulai sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tahun 1999, Gus Dur merencanakan untuk membuka kembali hubungan perdagangan dengan negeri penjajah itu, yang telah terputus sejak tahun 1967. Tujuan dibukanya kantor dagang Israel di Jakarta adalah untuk memulai babak baru hubungan ekonomi antara Israel dan Indonesia. Ternyata, sebelum kantor dagang Israel itu dibuka di Jakarta, hubungan "gelap dan diam-diam" antara Indonesia dan Israel telah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Ran Kohin, kepala kantor dagang Israel-Asia. Kohin menegaskan, dibukanya kantor dagang Israel di Jakarta merupakan hasil dari perkembangan yang baik dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, meskipun tak ada hubungan diplomatik antara keduanya. Tahun 2001, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Binsar Pandjaitan meneken Surat Keputusan Menperindag No 23/MPP/01/2001 tertanggal 10 Januari 2001 yang melegalkan hubungan dagang antara RI dengan Zionis-Israel.⁵

Kemesraan itu pun terus berlanjut pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 13 September 2005, Menteri Luar Negeri Hassan Wirayudha bertemu dengan Menlu Israel, Silvan Shalom, di New York, AS. Hassan mengaku pertemuan itu tidak membahas pemulihan hubungan diplomatik. “Kami tidak bicara masalah hubungan diplomatik. Israel sangat tahu

⁵ <http://www.voa-islam.com/read/technology/2009/08/15/753/pernyataan-pers-fuimenolak-israel-buka-kantor-cabang-di-jakarta>

posisi Indonesia seperti apa,” katanya. Saat itu pemberitaan di sejumlah media massa asing ramai menyiarkan keinginan Israel untuk membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Menurut media asing itu, Jerusalem (Israel) telah mengirimkan surat tentang hal itu kepada Jakarta.⁶

Usaha untuk membangun hubungan diplomatik antar kedua negara ini sebelumnya juga pernah terjadi sebelum organisasi ini berdiri, namun usaha tersebut gagal. Saat itu di zaman kepemimpinan Abdurahman wahid, lewat menteri luar negeri nya, Alwi Shihab. Gus Dur ingin sekali Indonesia mampu membuka dan membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Bukan hanya bertujuan untuk kerjasama dalam bidang ekonomi tapi juga sebagai juru diplomasi dalam konflik berkepanjangan Israel-Palestina. Dengan itu diharap Indonesia mampu memiliki posisi tawar yang mampu diperhatikan dunia sebagai mediasi perdamaian antar negara yang sedang bertikai.

Namun ini bertentangan secara konstitusional, keinginan membuka hubungan diplomatik akan tersandung dasar negara, khususnya pembukaan UUD '45. Terutama pada pembukaan UUD 1945 yg berbunyi "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan". Menjalin hubungan diplomatik dengan Penjajah Israel yang notabene telah menganeksasi tanah Palestina sejak tahun 1947 secara sepihak, dan mengusir penduduknya hingga menjadi pengungsi di berbagai negara tetangga, adalah tindakan yang mengkhianati landasan Konstitusional kita, identitas kita.

⁶ <https://haroky2000.wordpress.com/artikel/hubungan-rahasia-indonesia-israel/>

Pembukaan hubungan diplomatik juga tidak sejalan dengan prinsip perjuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI), di mana Indonesia salah satu anggotanya. Dalam KTT OKI Ke-6 di Dakar, Senegal, tahun 1991, misalnya, komunike sidang menegaskan, "Perdamaian hanya dapat ditegakkan dengan memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Palestina dan penarikan tanpa syarat pasukan pendudukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki, termasuk Al Quds Al-Syarif, Dataran Tinggi Golan, dan Lebanon Selatan." Dan Palestina merupakan satu-satunya negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, yang masih belum merdeka dari cengkraman Israel sampai saat ini.⁷

Pembukaan diplomatik juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok, dimana Indonesia menjadi pemrakarsanya. Karena, membuka hubungan diplomatik berarti mengakui eksistensi kolonialisme serta menyakiti perasaan umat Islam sedunia, umat Islam Indonesia khususnya. Hal ini terkait dengan penguasaan Masjidil Aqsa yang merupakan tempat suci kedua Umat Muslim.

Namun keterbatasan dengan tidak adanya hubungan diplomatik antar dua negara tersebut, pemerintahan Indonesia dimasa jabatan Gus Dur tetap ingin terjalinnya kerjasama antar kedua negara ini dalam hal perdagangan yang nantinya mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan menteri Luar Negeri saat itu, Alwi Shihab. Terkait dengan hal ini Menteri Luar Negeri RI, Prof. Alwi Abdurrahman Shihab, Ph.D menjelaskan bahwa rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel semata-mata untuk kepentingan bangsa untuk pemulihan ekonomi. "Pemulihan ekonomi harus kita

⁷ <http://www.nu.or.id/a,public,kolom> *Peran Gus Dur dalam Misi Perdamaian Israel Palestina*

capai dengan segala cara. Tetapi bukan dengan menjual prinsip-prinsip kita,” kata Alwi dalam pertemuan dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat. Beliau juga menyadari bahwa persoalan hubungan dengan Israel itu sangat sensitif. “Tetapi kita harus mulai. Kita harus pragmatis. Kita harus rasional. Pengusaha yang pragmatis dan rasional itulah yang akan maju,” tegas Alwi sebagaimana dikutip oleh “Koran Tempo” dalam artikel berjudul “Alwi Shihab: Tidak Surut Meski Diprotes”.⁸

Terkait isu hubungan diplomatik dengan Israel, Alwi Shihab menyatakan bahwa rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel sama sekali tidak mengurangi prinsip-prinsip dasar Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina. Dan hubungan itu, menurut Alwi, hanya sebatas hubungan dagang saja, tidak sampai hubungan diplomatik. “Karena kita masih menganggap Israel belum memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada Palestina,” tegas Alwi Shihab.⁹

Satu diantara kekuatan bangsa Israel ialah kekuatan lobi yang dimainkan oleh orang-orang Yahudi. Setidaknya lobi yang dilakukan itu lah yang membuat pemerintahan dimasa tersebut mati-matian untuk segera mewujudkan hubungan diplomatik antar kedua nya. Karena itu lah orang menyebutkan Lobi Israel lah yang membantu ide tersebut terwujud. Jaringan Zionis tanpa adanya lobi yang selama ini telah dilakukan, negara itu hanya akan menjadi Israel yang arogan dan akhirnya mati akibat dari kesemena-menaannya. Untuk itu, sebenarnya letak kekuatan utama Israel adalah lobi. Dengan lobi yang dilakukan untuk

⁸ <http://www.nu.or.id/,Peran+Gus+Dur+dalam+Misi+Perdamaian+Israel+Palestina-.php>

⁹ Ibid

mendapatkan dukungan negara-negara eropa dan barat, akan semakin memudahkan langkah Israel.

Ternyata kekuatan lobi Israel ini tidak hanya berada di Amerika, tetapi kekuatan lobi ini mulai berdiaspora hingga ke Indonesia. Ialah berdirinya Indonesia-Israel Public Affairs Committee atau yang sering disingkat IIPAC di Indonesia. IIPAC atau Indonesia-Israel Public affairs committee merupakan salah satu bentuk INGO yang muncul, dan juga menjadi bukti dari keterbatasan dan ketidakmampuan dari negara dan pemerintah untuk membangun hubungan Diplomatik terhadap Israel. IIPAC sendiri merupakan lembaga Non Pemerintahan yang mampu menjembatani kepentingan serta suara para penganut hingga yang pro terhadap Yahudi, terlebih untuk Israel di Indonesia. IIPAC sendiri digunakan sebagai wadah informal yang bertujuan sebagai tempat kerjasama antar negara hingga bahkan individu non pemerintah.

Di Amerika ada lembaga lobi Yahudi The American Israel Public Affair Committee (AIPAC) yang sangat berperan penting dalam menyetir kebijakan politik dan menentukan kemana arah kebijakan Amerika, namun kita tidak dapat menyimpulkan apakah lembaga ini sama persis atau tidak dengan yang ada di Amerika, namun di Indonesia pada Jumat, 29 Januari 2010, bertempat di sebuah tempat di Jakarta, sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Komite Urusan Publik Indonesia-Israel (Indonesia Israel Public Affair Committee - IIPAC) dirilis ke publik. Sebelumnya, tepatnya 21 Januari 2002, IIPAC sudah resmi didirikan dan memiliki akta notaris yang dikeluarkan oleh kantor notaris Nirmawati Marcia, SH di Jakarta.¹⁰ Namun terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa peranan NGO ini sangat sentral guna terbentuknya kerjasama saling menguntungkan guna kedua

¹⁰ <http://perang-ide.blogspot.com/2012/03/iipac-lembaga-lobi-zionis-di-indonesia.html>

negara, Indonesia dan Israel, namun juga tidak bisa dianggap remeh karena ini nyata nya LSM tersebut mendapatkan bantuan hukum terdaftar dan di ekspos oleh media massa berbahasa Inggris di Jakarta namun hanya di ekspos terbatas tanpa ada informasi lebih lanjut mengenai detail lembaga tersebut..

Namun tidak menutup kemungkinan dan salah menganggap bahwa LSM ini, dan terlebih Direktur Eksekutif nya Benjamin Ketang hanya sekedar orang yang kagum terhadap Israel sehingga membuatnya memainkan opini publik bahwa dia dan LSM yang ia pimpin memiliki kedekatan yang terbilang 'intim' dengan Israel, Yahudi, dan jaringan diluar Indonesia, termasuk dengan LSM yang serupa dan juga personal-personalnya. Karena ini terbukti kuat dengan pernyataan-pernyataan tokoh Yahudi dan surat kabar elektronik Detik.Com yang bisa dibuktikan bahwa komunitas Yahudi di Indonesia, yang salah satu nya terdapat di Manado tidak mengakui adanya hubungan dengan Benjamin Ketang dan IIPAC¹¹, ini mengindikasikan bahwa LSM ini masih abu-abu keberadaannya, tapi penulis masih yakin bahwa keberadaannya memang tidak mampu di tolak.

Diluar daripada itu, mungkin Lembaga ini begitu terasa asing di telinga masyarakat Indonesia. Karena lembaga yang di kepalai oleh Benjamin Ketang ini jarang atau malah hampir tidak pernah muncul di permukaan, bahkan diliput tentang aktivitas keseharian dari lembaga ini saja hampir jarang, entah ini memang suatu yang tidak menarik sehingga memang sengaja ditutupi dari masyarakat, atau ini hanya sebatas orang yang butuh sensasi untuk diakui. Bisa dikatakan juga bahwa lembaga ini masih bergerak secara halus dan terorganisir, atau sering kita sebut sebagai gerakan bawah tanah. Ini terbukti dengan ada nya

¹¹ <http://news.detik.com/read/komunitas-yahudi-perkataan-benjamin-ketang-fitnah>

kerjasama antara PT.Bakrie Brothers milik keluarga Bakrie dengan Vallar milik Rotschild keluarga bankir Yahudi yang kaya raya.

Gerakan Zionis tak akan pernah padam. Mereka bergerak lewat berbagai cara. Termasuk lewat invasi pemikiran dengan mengusung ide-ide sekularisasi-liberal, dan menguasai sektor bisnis dan perekonomian. Gerakan ini semakin berani dan terang-terangan, namun kesadaran umat dan tokoh-tokoh Islam akan bahaya Zionisme di Indonesia masih rendah.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

“Apa alasan berdirinya The Indonesia-Israel Public Affairs Committee (IIPAC) di Indonesia?”

C. Konsep / Teori Pemikiran

Melihat permasalahan di atas penulis akan mencoba mendeskripsikannya dengan menggunakan konsep dan teori. Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.¹² Sedangkan teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan. Teori merupakan suatu bentuk pertanyaan yang

¹² Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 93.

menjawab pertanyaan “mengapa”, artinya, berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi.¹³

1. Konsep Hubungan Transnasional

Asumsi pokok pandangan ini adalah berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor non-negara. Pendukung pandangan ini, seperti Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Jr., Richard Mansbach, Samuel Huntington, Raymond Hopkins, Richard Falk, dan lain-lainnya yakin bahwa batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kurang relevan. Negara-negara sering disusupi dan dilompati oleh aktor-aktor lain, baik sama-sama negara-bangsa maupun non-negara. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah geografis tidak perlu dihiraukan.¹⁴

Sejumlah ilmuwan, penulis dan bahkan negarawan yakin bahwa masih dipakainya logika tradisional yang mendasari Perjanjian Westphalia untuk memahami dunia masa kini tidak tepat dan bahkan bisa merugikan. Para pengamat ini berpendapat bahwa kalo pemerintah tetap memandang dunia dengan menggunakan citra kuno itu (misalnya, negara-bangsa sebagai aktor yang berdaulat, berperilaku bebas dan memiliki kekuatan militer), pandangan itu bisa mengarahkan dalam pembuatan kebijaksanaan yang salah dan tidak semestinya, bahkan bisa membahayakan kehidupan umat manusia.¹⁵

Mereka ini mengusulkan model untuk menggambarkan dunia dalam pengertian hubungan *transnational*, bukan hubungan internasional. Transnasional didefinisikan oleh Richard Falk sebagai “*perpindahan barang, informasi, dan*

¹³ *Ibid*, hal. 185.

¹⁴ Mohtar Mas’oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990.

¹⁵ *Ibid*, hal 230

gagasan melintas batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah". Konsep ini jelas mengurangi makna penting gagasan mengenai kedaulatan, batas wilayah nasional, dan interaksi pemerintah-pemerintah dalam sistem dunia. Karena setiap negara begitu mudah disusupi dan begitu terbuka bagi pengaruh dari luar, akibatnya politik dalam negeri tidak bisa dibedakan dari politik internasional. Pola hubungan penetrasi dari kaitan-kaitan baru ini melibatkan partisipasi besar-besaran dari berbagai jenis aktor non-negara, terutama organisasi non-pemerintah dalam negeri atau internasional.¹⁶

Salah satu ciri pokok hubungan transnasional ialah adanya berbagai jenis interaksi yang mem-*by-pass* pemerintah negara-negara dan yang secara langsung mempengaruhi lingkungan dalam negeri pemerintah-pemerintah nasional itu. Dalam model transnasionalis, aktor-aktor non-negara itu jauh lebih penting daripada yang digambarkan oleh model realis atau *state-centris*. Aktor-aktor ini bisa berujud kelompok-kelompok suku, etnis, atau separatis dalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan multinasional, dan bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah

Para pendukung transnasional berpendapat bahwa berbagai aktor non-negara ini bisa mempengaruhi politik dunia secara langsung, tidak hanya lewat pengaruh atas negara-bangsa. Juga, mereka menyatakan bahwa "kekuasaan" setiap aktor internasional tergantung pada isu atau situasi yang melingkupi. Kekuasaan dan pengaruh adalah hasil hubungan antar aktor-aktor. Setiap aktor, baik negara, organisasi internasional maupun organisasi non-pemerintah, memiliki kelemahan dan membutuhkan peran dari aktor-aktor lain. Dan ini membuat aktor

¹⁶ *Ibid*, 231

memiliki ‘senjata’ untuk mempengaruhi aktor lain. Ini terutama sekali penting bagi pandangan transnasionalis, karena pandangan ini menekankan bahwa isu-isu sentral dalam interaksi internasional sedang berubah.

Ini menandai ciri transnasionalisme yang lain. Yaitu pendapat bahwa isu-isu yang dimunculkan oleh berbagai aktor itu *bukan semata-mata* isu militer-keamanan. Sementara pandangan *state-centric* memusatkan pada masalah kekuasaan dan keamanan (seperti yang ditunjukkan oleh kaum realis), menurut pandangan transnasionalis masalah-masalah militer-keamanan *tidak lagi sentral*, tetapi sudah diganti oleh isu ekonomis. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan tentang semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan aktor-aktor non-negara terhadap interdependensi ekonomi.¹⁷

Berlandaskan konsep hubungan transnasional, maka dapat dipahami bahwa IIPAC muncul sebagai INGO yang menggantikan peran pemerintah dalam menjembatani kepentingan yang tidak lagi berpusat pada kekuatan dan militer seperti paham kaum realis, melainkan guna terjadinya interaksi dan koneksi antar kelompok kepentingan non-negara yang melewati batas kedaulatan nasional Indonesia. Hadirnya IIPAC ini juga disebabkan karena tidak terjalinnya hubungan diplomatik diantar kedua negara, yaitu Indonesia dan Israel. Walaupun dengan tidak adanya hubungan diplomatik antar keduanya bukan berarti kerjasama tidak bisa berlangsung. Dengan IIPAC sebagai alat nya kerjasama tetap berlangsung, tidak hanya pada tataran ekonomi seperti perdagangan, tapi dibidang strategis yang lain guna mendukung.

¹⁷ Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990.hal 232

2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, adalah sebagai berikut;

“konsep kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor paling mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan (decision making) dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur itu mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.”¹⁸

Konsep tersebut dapat diartikan bahwa kepentingan pada dasarnya merupakan faktor penting yang menuntun pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan luar negeri, dimana kepentingan tersebut meliputi mempertahankan kelangsungan hidup, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Adapun kepentingan yang ingin dicapai oleh LSM ini adalah terbentuknya lobi Yahudi di Indonesia yang nanti nya mampu menyetir kebijakan pemerintah. Tak lain dan tak bukan yaitu turut serta dalam membangun terbentuknya hubungan yang lebih nyata antara Indonesia dan Israel dalam bentuk kawat diplomatik guna membuka hubungan yang lebih intens antar kedua nya. Serta kepentingan lain yang juga tertuang dalam pasal 4 Akta pendirian IIPAC, yakni menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga-lembaga Israel, Yahudi

¹⁸ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Putra A Bardin, Jakarta, 1999

Internasional, dan melindungi hak-hak warga Yahudi dan keturunan Yahudi di Indonesia, serta memajukan kerjasama bisnis, investasi, IT, dan pendidikan dengan Universitas di seluruh dunia.¹⁹

D. Hipotesa

Dari permasalahan yang diajukan penulis, penulis dapat menyimpulkan jawaban sementara mengenai berdirinya LSM IIPAC di Indonesia

- Alasan berdirinya IIPAC nantinya mampu sebagai jembatan kerjasama ekonomi dan politik Indonesia dan Israel.
- Sebagai langkah membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia
- Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga-lembaga Israel, Yahudi Internasional, dan melindungi hak-hak warga Yahudi dan keturunan Yahudi di Indonesia, serta memajukan kerjasama bisnis, investasi, IT, dan pendidikan dengan Universitas di seluruh dunia.

E. Tujuan Penelitian

1. Memenuhi kewajiban akademis yang harus ditempuh penulis guna syarat memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Guna mengetahui eksistensi mengenai lembaga Indonesia-Israel Public Affairs Committee (IIPAC) di Indonesia.
3. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan teori dan membuktikan hipotesa yang ada.

¹⁹ <http://iipac.wordpress.com/about/protokol-indonesia-israel>

4. Untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulisan, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Secara umum penulis membatasi dari tahun 2002 saat berdirinya IIPAC-sekarang. Meskipun demikian, berbagai hal yang terjadi sebelumnya yang menjadi latar belakang peristiwa-peristiwa selanjutnya tetap menjadi pembahasan yang penting untuk membantu memberi jawaban seobyektif mungkin.

G. Metode Penelitian

a. Data yang dibutuhkan

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah masalah mengenai alasan mengapa lembaga Indonesia-Israel Public Affairs Committee (IIPAC) berdiri di Indonesia.

Dengan demikian maka data yang dibutuhkan sebagai bahan analisa terutama adalah: data latar belakang mengenai dinamika politik di kedua negara, serta alasan pembentukan lobi Israel di dunia serta di Indonesia, data mengenai konsep kepentingan nasional, konsep hubungan transnsional.

b. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti yang diatas, dilakukan dengan menggunakan cara pengumpulan data Dokumentasi, yaitu dengan cara

pengumpulan data dengan melihat, mengabadikan, memeriksa, dan mempelajari dokumen-dokumen yang dibutuhkan, serta via e-mail penulis dengan narasumber.

c. Jenis penelitian

Penelitian Perpustakaan (*Library Research*). Penelitian Perpustakaan adalah penelitian dengan cara membaca, mempelajari berbagai literatur yang relevan untuk mendapatkan landasan teori yang akan diterapkan pada masalah yang akan diteliti.

d. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menggambarkan atau menguraikan hasil dari pengamatan (observasi terhadap gejala, peristiwa dan kondisi faktual), sedangkan kualitatif artinya naratif atau paparan yang secara lahiriah berujud susunan kata dan kalimat yang dituankan dalam skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan di atas.

BAB I Pendahuluan berisikan Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Landasan Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, pada bab ini dibagi menjadi dua (2) pembahasan ;

- A. Membahas mengenai gambaran umum dan perkembangan politik luar negeri Israel dan Indonesia serta dengan beberapa bagian yaitu geografi,

penduduk dan sejarah Indonesia dan Israel, serta membahas sejarah singkat berdirinya *Indonesia-Israel Public Affairs Committee* di Indonesia.

BAB III Membahas mengenai faktor sosial-politik sebagai alasan dan tujuan berdirinya IIPAC di Indonesia.

BAB IV Membahas mengenai faktor ekonomi sebagai alasan dan tujuan berdirinya IIPAC di Indonesia.

BAB V Berisikan kesimpulan dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.